

BIROKRASI PENYALURAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA KURANG MAMPU

Ilyas Ismail

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim

ABSTRAK

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak. Dalam suatu perumusan lain dikemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan berbagai tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Pembuatan kebijaksanaan yang rasional memerlukan informasi yang lengkap mengenai berbagai alternatif kebijaksanaan, kemampuan meramal untuk melihat secara cermat akibat-akibat dari kebijaksanaan yang dipilih dan kejadian untuk memperhitungkan secara tepat nisbah antara biaya dan manfaat yang diperoleh pembuatan kebijaksanaan yang rasional juga membutuhkan adanya suatu sistem pengambilan keputusan yang mendorong terciptanya rasional dalam perumusan kebijaksanaan. Pemberian bantuan dana harus melalui beberapa tahapan yang telah digariskan dalam prosedur kegiatan. Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, penyaluran bantuan dana yang tidak melalui seleksi akan mengakibatkan kecemburuan antara mahasiswa yang tidak menerima bantuan dengan mahasiswa yang menerima bantuan. Hal inilah yang harus dapat masyarakat hindari.

Kata Kunci: Birokrasi dan Biaya Pendidikan

PENDAHULUAN

Peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan dibidang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada kenyataan bahwa perbaikan "human factor" akan memberikan kontribusi yang besar pada laju pertumbuhan sehingga peningkatan sumber daya manusia di pandang sebagai kunci keberhasilan dalam pembangunan yang dapat menjamin kemajuan dan kestabilan ekonomi.

Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Biaya pendidikan sekarang ini tidak murah lagi karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi melainkan, juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah keatas. pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan (keahlian) tenaga kerja, pada gilirannya dapat

meningkatkan produktivitas (Effendi, 1995).

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia adalah tidak tersedianya dana yang cukup. Keterbatasan dana tersebut menyebabkan pemerintah hanya memberikan prioritas pada bidang-bidang tertentu. Selama ini orientasi pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan sektor industri, sementara sektor lain termasuk pendidikan belum banyak mendapat perhatian.

Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. setiap keluarga harus memiliki perencanaan terhadap keluarganya sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka pendidikan yang diberikan pada anak akan terus sehingga anak tidak akan putus sekolah. tanggung jawab orang tua sangatlah berat karena harus membiayai

anak sejak dia lahir sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Mahalnya biaya pendidikan sekarang ini dan banyaknya mahasiswa yang berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pentingnya pendidikan bagi sang buah hatinya sehingga membuat anak putus sekolah, anak tersebut hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah ke atas. Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Jika masalah ini tidak mendapat perhatian maka program tersebut tidak akan terealisasi. Banyak anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Melihat keadaan sekarang maka pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui penyediaan dana alokasi sosial dan kesejahteraan memberikarn bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Biaya siswa yang diberikan kepada mahasiswa akan mampu meringankan beban biaya pendidikannya.

Penelitian awal diketahui bahwa harapan untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan agaknya hanya menjadi harapan, tujuan penyediaan dana pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu ternyata banyak menyimpang dari tujuan. Dana yang diperuntukkan untuk mahasiswa miskin justru dinikmati oleh kalangan mampu. Hal ini akibat lemahnya birokrasi yang diterapkan dalam penyaluran beasiswa tersebut. Pemberlakukan syarat yang hanya melampirkan keterangan miskin dari geuchik dan lampiran indeks prestasi kumulatif begitu mudah diperoleh oleh siapa saja yang ingin mengajukan, sedangkan dana pendidikan ini biasanya diberikan kepada orang-orang terdekat dari birokrat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dengan ruang lingkup membahas birokrasi penyaluran biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu. Adapun penelitian ini dilaksanakan

dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2010.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis dimana akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat menunjukkan hasil akhir. penelitian pendekatan ini dipandang relevan untuk mengkaji persoalan tentang birokrasi penyaluran biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Aceh utara.

Penelitian ini menggunakan model analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, setiap perkembangan data yang diperoleh akan ditampilkan dalam laporan penelitian . Dengan demikian, kegiatan analisis data sudah mulai dilalukan pada saat-saat awal pengumpulan data lapangan. Data yang sudah dikumpulkan diatur secara berurutan, diorganisasikan ke dalam satu pola, dikategorikan dan diuraikan ke dalam satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonversikan dan diinterpretasikan. Pengkonversikan data dimaksudkan untuk menentukan data-data yang dirasa kurang valid terhadap hal demikian data tersebut akan direduksikan. Sedangkan keseluruhan data yang dimiliki akan coba diinterpretasikan sebaik mungkin, dengan harapan dapat memahami dengan sebaik-baiknya data yang diperoleh, sehingga pada gilirannya dapat memahami dan menentukan jawaban birokrasi penyaluran biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Aceh Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh utara adalah kabupaten yang berbatasan sebelah utara dengan selat malaka, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur sebelah barat berbatas dengan kabupaten Bireuen.

Dengan luas wilayah 3,477. 92 km². terletak pada garis 96,20-97,21⁰ bujur timur dan 4,54⁰ sampai 5,18⁰ lintang utara. Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah daratan rendah (bahagian utara) menghadapi ke selat malaka dengan ketinggian antara 0,5 samapai 100 meter. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan, 56 mungkin dan 852 gampong.

Kabupaten Aceh utara mempunyai iklim tropis dengan suhu rata-rata 28⁰c – 32⁰c, dan curah hujan 1.704 mm/tahun, serta berada pada ketinggian 0 m - 250 di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten - Aceh utara secara umum merupakan dataran rendah, kecuali pada bagian tengah terdapat daerah perbunasyarakatan dengan ketinggian dibawah 100 m dari permukaan laut.

Gambaran Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dan Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Utara

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Utara merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dan berada dibawah Asisten Ekonomi dan Purnbangunan, yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Dasar hukum pembentukan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh utara mengacu kepada peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berpedoman kepada ketentuan tersebut, telah menetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tanggal 12 Februari 2010 M bertepatan dengan 27 Shafar 1431 H. Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh utara berkantor di Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe, menyatu dengan Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara.

Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dan Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Utara

Bagan susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Kahupaten Aceh Utara. Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Kahupaten Aceh Utara mempunyai pegawai berjumlah 27 orang.

Pembahasan

Birokrasi Penyaluran Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Kurang Mampu Di Kabupaten Aceh Utara

Perkataan birokrasi dalam pelayanan pemerintah lebih ditekankan bagaimana semestinya mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan. Di mana birokrasi sebagai organisasi besar dan modern memiliki ciri-ciri universal seperti mementingkan orientasi tugas, pencapaian tujuan, terdapatkan keuntungan atau memenuhi tujuan-tujuan perencanaan, mendukung efesiensi, koordinasi, rasionalitas keputusan, menolak spontanitas, kekacauan atau eksidentalisme, menekankan sistematisasi, akurasi, menunjang verifikasi, kontrol dan formalisasi dial menolak hedonisme organisasi.

Birokrasi pemerintah mempunyai hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah yang mana pejabat birokrasi pemerintah adalah sentral dan penyelesaian urusan masyarakat dan rakyat sangat tergantung pada pejabat dan bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat. Berdasarkan kenyataan itu, dalam penyaluran beasiswa, birokrasi juga memegang perann penting didalam suatu penyelenggaraan organisasi pemerintah.

Interaksi mahasiswa dan pemerintah dapat dilihat dari dipahami melalui berbagai

kegiatan, diantaranya yang paling jelas adalah dalam bidang kegiatan yang dinamakan pelayanan publik, disinilah akan dijelaskan bagaimana keduanya berinteraksi, saling mendudukan diri dan memperlakukan pihak lain. Dalam pelayanan publik, keberadaan pemerintah atau sering disebut birokrasi tidak lain adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan dalam rangka penuhi kebutuhan publik.

Salah satu bentuk hubungan interaksi antara pemerintah dan mahasiswa adalah bidang pelayanan penyaluran beasiswa. Bentuk penyaluran dana beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu yang diberikan dapat dilihat dari data rekapitulasi pemberian beasiswa mahasiswa kurang mampu dari Bagian Kesra sedda Kabupaten Aceh Utara. Menurut Kesra, bagi mahasiswa yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh beasiswa hendaknya memenuhi berbagai persyaratan yaitu :

1. Surat Permohonan Beasiswa
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah
3. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa / Cleuchik
4. Surat Keterangan Hasil Studi / KHS
5. Foto Copy KRS
6. Foto Copy KTP
7. Foto Copy KK
8. Foto Copy KTM
9. Foto Copy Rekening Bank

Selanjutnya, berkas berbagai persyaratan tersebut diajukan ke bagian Kesra Aceh Utara untuk diproses, yaitu dalam hal penyeleksian data-data mahasiswa yang layak memperoleh beasiswa atau memperoleh beasiswa lebih dahulu. Berkas permohonan beasiswa yang diseleksi di bagian Kesra sering mengendap sarnpai beberapa waktu lamanya, sehingga seringkali hal ini menimbulkan kesan yang negatif dari mahasiswa yang membutuhkan dana untuk kelanjutan studinya.

Bagi mahasiswa yang diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut, bukan berarti memperoleh kemudahan dalam menyediakannya. Misalnya dalam

membuat surat keterangan kurang mampu dari geuchik, belum tentu geuchik langsung menyetujuinya, atau juga geuchik tidak berada di tempat, ditambah lagi membuat surat-surat pendamping lainnya kemungkinan besar seorang mahasiswa mendapatkan hambatan dalam memperolehnya.

Berdasarkan berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa pamohon beasiswa dalam menyediakan persyaratannya, disini dituntut pemerintah untuk melaksanakan birokrasi penyaluran beasiswa secara benar, disiplin dan sebaik-baiknya. Penyeleksian permohonan dan observasi lapangan bila perlu dilakukan secara cepat dan teratur, dengan demikian permohonan yang masuk tidak sampai bertumpuk dan tumpang tindih, sehingga menyebabkan kehilangan berkas.

Penyelenggaraan birokrasi yang teratur ini merupakan tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.

Begitu pentingnya profesionalisme pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan No. 81 Tahun 1993 tentang pedoman Tata-Laksana Pelayanan umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar pada prinsip-prinsip pelayanan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra Aceh Utara berikut:

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. Pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketepatan waktu, bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat

diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan (wawancara, 20 Maret 2010).

Dibidang pemerintahan masalah pelayanan merupakan kegiatan yang sangat penting, perannya lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Karena pelaksanaan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan.

Mengenai birokrasi persyaratan beasiswa yang harus dipenuhi, mendapatkan tanggapan dari Adnan salah seorang mahasiswa Almuslim asal Aceh Utara:

Persyaratan dan birokrasi yang harus dipenuhi dalam proses permohonan beasiswa sebenarnya tidak sulit dan dapat masyarakat penuhi, yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang berkas yang masyarakat ajukan hilang dan harus masyarakat lengkapi kembali (wawancara, 20 Maret 2010)

Hal ini dibenarkan oleh Hasbi mahasiswa STAIN Malikussaleh sebagai berikut:

Pemenuhan persyaratan telah masyarakat lengkapi di kampus, tetapi pada saat akan melakukan penerimaan beasiswa masyarakat harus memberi berkas yang sama kepada bidang Kesra. Sebenarnya dibawa kemana berkas yang dari kampus masyarakat tidak tahu (wawancara, 20 Maret 2010)

Tanggapan lain diberikan oleh Nurani mahasiswa Universitas Malikussaleh sebagai berikut :

Persyaratan sudah masyarakat lengkapi dari tahun lalu tetapi sekarang masyarakat disuruh kembali melengkapi kembali berkas permohonan beasiswa. Sebenarnya apa yang dilakukan masyarakat tidak paham. Permohonan dan tanda terima telah masyarakat tanda tangani tetapi dananya belum juga cair, disuruh kembali untuk membuat permohonan baru. (Wawancara, 20 Maret 2010)

Berbagai tanggapan negatif ini menunjukkan masih adanya kelemahan

dalam proses birokrasi pelayanan pengurusan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu di Aceh Utara. Oleh karena itu diperlukan suatu studi pelayanan yang dikenal dengan organisasi pelayanan masyarakat. Yaitu suatu pengetahuan yang mempelajari pemaduan organisasi dari tugas umum pemerintah dan semua aspek fungsi organisasi dengan memperhatikan keselarasan diantara sumber-sumber manajerial untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Organisasi yang dimaksud oleh penulis ialah aktivitas yang dilancarkan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Uraian dari segi aktivitas ini diambil karena disinilah letak dinamikannya organisasi, terutama jika dihubungkan dengan kegiatan pelayanan yang menjadi pokok bahasan pelayanan haruslah aktif dan dinamis karena dalam layanan pada dasarnya manusialah yang menjadi sasaran baik secara perorangan, maupun berkelompok dalam bentuk badan/organisasi.

Keadaan demikian sebagian besar terdapat hampir di setiap level dan jenis pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pembenahan secara terus menerus sehingga dapat mengadaptasi dinamika masyarakat secara langsung.

Penyebab tidak Efektifnya penyaluran Biaya pendidikan untuk Mahasiswa Kurang Mampu Di Kabupaten Aceh utara

Penyeleksian proposal mahasiswa bukan dengan maksud memilih nama yang berkenan di hati pegawai pemerintahan tetapi untuk menilai kelayakan dari mahasiswa yang akan menerima bantuan beasiswa tersebut, ditinjau dari segi keadaan ekonomi dan rumah tempat kediamannya.

Penyaluran bantuan dana menjadi sangat penting, selama ini pola penyaluran telah menyebabkan ketimpangan yang demikian. besar antara mahasiswa yang mampu dan mengerti dengan mahasiswa yang tidak mampu dan tidak mengerti tentang prosedur penyaluran bantuan dana. Oleh karena itu guna memberikan

manfaat pemberian bantuan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan mahasiswa maka perlu dirancang program pemberian bantuan dana yang serasi dan partisipatif yang memberikan peran seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk melaksanakan program kesejahteraan.

Namun kenyataannya pemberian bantuan dana tidak berjalan lancar sebagai mana yang direncanakan. Disebabkan adanya ketidak seimbangan antara jumlah mahasiswa dengan jumlah dana yang disediakan. Di mana banyak Mahasiswa yang mengharapkan terpilih sebagai

penerima bantuan dana, meskipun mereka tidak layak dipilih karena dianggap lebih mampu dibandingkan dengan yang lainnya. hal yang demikian menimbulkan kepincangan sosial yang sukar diatasi terhadap penyaluran bantuan dana. Pemberian beasiswa selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka antara kebutuhan dana dan mahasiswa yang kurang mampu tidak sebanding.

Berikut merupakan data jumlah penyaluran beasiswa yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Realisasi Anggaran Untuk Beasiswa

Tahun	Jumlah permohonan	Beasiswa S1	Beasiswa S1	Jumlah Dana	Ket
2006	854	650	25	Rp. 972.800.000	
2007	1263	750	20	Rp. 1.184.100.000	
2008	1682	800	30	Rp. 1.309.200.000	
2009	2031	450	20	Rp. 910.850.000	
2010	2420	-	-	Rp. -	Non Anggaran

Sumber Bid Kesra Kab. Aceh Utara. 2010

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah pemohon setiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2006 jumlah pemohon mencapai 854 pemohon, dana yang disediakan berjumlah Rp 972.800.000,-. Pada tahun 2007 jumlah pemohon mencapai 1.263 dana yang disediakan mencapai Rp. 1.184.100.000, jumlah peningkatan dana tersebut tidak sebanding dengan persentase peningkatan jumlah dana. Tahun 2008 jumlah pemohon mencapai 1.682, dana yang disediakan mencapai Rp. 1.309.200.000.- Tahun 2009 jumlah pemohon beasiswa mencapai 2.031, dana yang disediakan hanya Rp. 910.850.000.- penurunan anggaran ini dikarenakan keterbatasan dana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 2010 walaupun pemerintah daerah telah mengisyaratkan tidak akan ada pencairan dana beasiswa tetapi jumlah pemohon beasiswa mencapai 2.240.

Pemberian bantuan dana beasiswa dibutuhkan sistem proposional, hal ini disampaikan oleh Anwar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh menvatakan

“Jika pemberian bantuan dana tidak diseleksi oleh pemerintah, maka hal tersebut akan menimbulkan gejolak sosial di mahasiswa saya sangat senang karena dalam penyaluran dana bukan saja masyarakat sudah mengirimkan proposal kepada bupati, tetapi juga pemberian beasiswa tersebut dilaksanakan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan". (wawancara tanggal 3 Maret 2010).

Berdasarkan keterangan yang diberikan menunjukkan harapan dari mahasiswa yang menginginkan pemberian beasiswa benar-benar objektif. Sehingga pemberian beasiswa tersebut diterima oleh mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Apabila syarat permohonan beasiswa melalui permohonan atau proposal yang menyertakan surat keterangan kurang mampu dari desa. Pemerintah bias mengklarifikasi kebenaran dari surat tersebut. Permasalahan yang sehunga ini terjadi adalah pemberian beasiswa sering diterima justru pada mahasiswa yang mampu.

Abdullah mahasiswa Akper pmda Aceh Utara mengaiukan:

“Terjadinya komplain mahasiswa dikarenakan ada warga yang ternyata rumahnya layak huni tetapi membuat permohonan beasiswa dan terpilih untuk mendapat bantuan. pada saat dilakukan survei, ia menunjukkan rumah gubuk yang bukan miliknya”. (Wawancara, tanggal 3 Maret 2010).

Pemberian bantuan dana harus melalui beberapa tahapan yang telah digariskan dalam prosedur kegiatan. Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, penyaluran bantuan dana yang tidak melalui seleksi akan mengakibatkan kecemburuan antara mahasiswa yang tidak menerima bantuan dengan mahasiswa yang menerima bantuan. Hal inilah yang harus dapat masyarakat hindari.

Berdasarkan keterangan yang diberikan dari hasil wawancara dan penjelasan lainnya diketahui bahwa penyebab tidak efektifnya penyaluran biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Aceh Utara antara lain adalah:

1. Masalah yang dihadapi dalam proses penyaluran beasiswa adalah kurang proporsionalnya dana yang diperlukan dengan jumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa.
2. Mudahnya pembuatan surat keterangan kurang mampu yang dibuat dari desa, surat keterangan tersebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh biaya siswa yang dikeluarkan oleh kepala desa.
3. Pengajuan syarat penerimaan biaya siswa yang dilakukan berulang-ulang. Hal ini mengindikasikan tidak beresnya pelaksanaan administrasi di Bidang Kesra sehingga menyebabkan pengajuan persyaratan harus dilakukan beberapa kali sampai diberikannya beasiswa.
4. Permohonan beasiswa yang dilakukan berulang-ulang. hal ini menyebabkan makin banyaknya permohonan beasiswa setiap tahunnya.

Tindakan Yang Dilakukan pemerintah untuk Meningkatkan Keefektifan Dalam Penyaluran Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Kurang Manpu Di Kabupaten Aceh Utara

Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara memiliki beberapa keunikan dan kelebihan jika disejajarkan dengan kabupaten lain. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 622.720 jiwa yang memiliki kepadatan penduduk rata-rata 184 orang/km² tentunya memberi pengaruh secara langsung terhadap kemajuan dan potensi di bidang pendidikan.

Hal tersebut merupakan aset bagi pemerintah daerah untuk dapat terus berpacu dalam usaha peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Beberapa strategi dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai tindak lanjut peningkatan sumber daya manusia.

Kepala Bagian Kesra Aceh utara memberikan penjelasan yang berhubungan dengan tindakan pemerintah untuk mengefektifkan pemberian beasiswa sebagai berikut :

Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. Setiap keluarga harus memiliki perencanaan terhadap keluarganya sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka pendidikan yang diberikan pada anak akan terus sehingga anak tidak akan putus sekolah (wawancara, 20 Maret 2010).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak sepenuhnya jadi tanggungan pemerintah. Pemerintah juga akan menggerakkan masyarakat untuk lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Tanggung jawab orang tua sangatlah berat karena harus membiayai anak sejak dia lahir sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan positif dari praktisi pendidikan. Takyuddin Muhammad anggota MPU, bidang pengembangan pendidikan mengatakan:

Mahalnya biaya pendidikan sekarang ini

dan banyaknya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pentingnya pendidikan bagi sang buah hatinya, sehingga membuat anak putus sekolah, anak tersebut hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas dan biaya pendidikan seperti beasiswa masih diperlukan. (Wawancara, 26 Maret 2010)

Berdasarkan pengkajian hasil wawancara menunjukkan perlunya perhatian pemerintah bidang pendidikan, salah satunya dengan beasiswa, hanya saja pemerintah daerah harus memperhatikan sistem pemberiannya agar lebih efektif. Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Jika masalah ini tidak mendapat perhatian maka program tersebut tidak akan terealisasi. Banyak anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Sarjani, Mahasiswa STAIN Malikussaleh, memberikan keterangannya :

Kami berharap pada pemerintah untuk memberikan kebijakan dan peduli terhadap pendidikan dan masyarakat Aceh Utara, karena sekarang ini bangsa Indonesia banyak mengalami problema khususnya problema bencana alam yang mengakibatkan rusaknya lembaga pendidikan. (Wawancara, 26 Maret 2010).

Masalah biaya pendidikan masih terus menjadi sorotan. Sebagai contoh, tentang komersialisasi dan liberalisasi. Patut masyarakat pahami bersama bahwa kalau masyarakat melihat biaya pendidikan tinggi, ternyata memang tidaklah sederhana. Biaya universitas pasti tinggi karena sebagai *learning center* yang *science center*, dana yang dibutuhkan untuk satu universitas sangat besar.

Menurut Maryam, Dosen Unimal memberikan penjelasan tentang bagaimana seharusnya proses pemberian beasiswa sebagai bentuk infestasi pendidikan daerah sebagai berikut :

Peningkatan kemampuan dosen merupakan modal besar bagi peningkatan daya saing perguruan tinggi. Pengelolaan mahasiswa secara proporsional sesuai

dengan keahlian yang diinginkan juga bukan barang murah karena sarana pembelajaran harus selalu disesuaikan. Proses pendidikan di perguruan tinggi mengacu kepada kegiatan Tri Dharma. Beasiswa sebaiknya lebih mengarah kepada kebutuhan dan orientasi pembangunan daerah. (Wawancara, 2 April 2010).

Kegiatan pendidikan harus diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan kemajuan zaman yang tentunya harus didukung oleh kegiatan riset termasuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk memperbaharui seluruh proses kegiatan dibutuhkan biaya yang tidak murah. Ketersediaan dana sangat penting bagi pengelolaan universitas. Karena itu sumber dana untuk penyelenggaraannya harus jelas.

Secara garis besar dana untuk mengoperasikan universitas dapat berasal dari pemerintah dan dana masyarakat. Dana pemerintah dapat dibagi dalam dana rutin dan dana kompetitif, sementara dana masyarakat dapat dibagi menjadi dana dari cant; sekolah (dan yang terkait) serta dana riset dan pengembangan (kerja sama) yang sifatnya kompetitif dan berbagai sumbangan berbagai pihak.

Dana masyarakat selain uang sekolah yang berasal dari mahasiswa, dana masyarakat lainnya diusahakan oleh universitas. Setiap universitas harus mengelola pendapatannya untuk kegiatannya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan masing-masing. Keuangan akan sangat menentukan mutu universitas, akuntabilitas akademik, dan keuangan menjadi keharusan untuk dijalankan.

Mahasiswa dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu mahasiswa membayar penuh, membayar lebih secara sukarela, dan bersubsidi. Biasanya untuk universitas di negara maju proporsi mahasiswa yang bersubsidi jumlah proporsinya akan terbesar.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan serta saran dari penelitian ini adalah :

Tindakan yang dilakukan Pemerintah harus melakukan tindakan untuk meningkatkan keaktifan dalam penyaluran biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang

mampu di Kabupaten Aceh Utara yaitu lebih menyeleksi data mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa di samping itu juga menyediakan dana untuk mendukung kelancaran pemberian beasiswa seperti memberdayakan dana dari masyarakat yang dibagi menjadi dana dari uang sekolah (dan yang terkait serta dana riset dan pengembangan (kerja sama) yang sifatnya kompetitif dan berbagai sumbangan berbagai pihak.

Peningkatkan anggaran pemberian beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya. Hal ini juga sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20% dari seluruh anggaran. Seharusnya hal tersebut dapat juga diimplementasikan dalam APBD. Selain itu peningkatan anggaran juga akan mampu menunjang pendidikan daerah agar mampu bersaing dengan daerah lain sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, 2002, *Membangun sistem pelayanan publik yang Memihak pada Rakyat*, Buletin Populasi Vol. 13

- No. 1, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Ali,1., 2003, *Kebijaksanaan pendidikan; perumusan, pelaksanaan dan Penilaiannya*, FKIP IKIP, Malang.
- Arikunto, S., 2010, *Manajemen penelitian*, cetakan Ketujuh, Rineka cipta Jakarta.
- Attia, M.1-1., 2008, *Bimbingan Pendidikan dan Pekerjaan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ayub, 2010, *Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian, S.P., 2002, *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku organisasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sri, S. dan Supriyanto Eko, 2001. *Operasionarisasi Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Suwarno, H., 2002, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Management*, Gunung Agung Jakarta
- Widodo, I., 2001, *Good Governence Tetaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Birorvasi Penyaluran Beasiswa Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Bumi Aksara Jakarta.